

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN

Varrel Ifram Sham

NPP. 29.1991

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: varreliframsham@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Performance Based Budgeting is a budgeting system which focus on the output achievement effort of cost allocation plan or expected input. While, the research object was Development Planning Agency, Research and Development Tarakan. Purpose:* *This research aimed to analyze the implementation of performance based budget principle on one of the government institutions in Tarakan. Method:* *This research also looking for how. Besides, the research was descriptive-qualitative with its budget data of 2016-2018. While, both of the data were primary and secondary. This study looks at how the implementation of the principle of performance-based budgeting according to Halim and Iqbal's theory. Result:* *Based on the research result, the implementation of performance based budget had run well. Conclusion:* *This could be shown as there was clear government strategies (vision, mission, objectives, and its target), working program, performance evaluation on the previous period, and some solutions of managing existed problems. In addition, all of them had been stated within the data of Government Performance Accountability Report which was arranged by Development Planning Agency, Research and Development Tarakan annually.*

Keywords: *performance based budget, development planning agency, research and development tarakan, government performance accountability report*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Obyek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja pada salah satu instansi pemerintah yang berada di Kota Tarakan. **Metode:** Penelitian ini melihat bagaimana penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja menurut teori Halim dan Iqbal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan data anggaran 2020. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. **Hasil:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan dengan baik. **Kesimpulan:** Hal ini dapat dilihat dari penetapan strategi pemerintah (visi, misi, tujuan, dan sasaran), penetapan program, evaluasi kinerja, serta cara menangani hambatan yang terjadi dimana hal tersebut sudah tertuang semuanya dalam data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan di setiap tahunnya.

Kata Kunci : anggaran berbasis kinerja, bappeda litbang, dan lakip



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terbaru Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara pemberian program pembinaan khusus dan sanksi administratif di bidang pemerintahan, sesuai dengan Pasal 353, serta ketentuan lain sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 383. Kedua unsur muatan yang ditetapkan tersebut berkaitan erat, yaitu peraturan tentang sanksi administratif dan program pembangunan khusus di bidang pemerintahan, yang dilaksanakan sebagai hasil pengawasan kinerja pemerintah, kewenangan daerah dan merupakan bagian dari Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan terkait tata cara pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah serta penjatuhan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin kuat.

Era *New Public Management* menandai adanya reformasi terhadap anggaran sehingga mendorong pengembangan pendekatan penganggaran sektor public yang lebih sistematis. Pemerintah saat ini menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penganggaran sektor publik. Sistem penganggaran sektor publik ikut berkembang sejalan dengan perkembangan dari manajemen sektor publik itu sendiri. Teknik penganggaran sektor publik muncul seiring dengan hal tersebut seperti, *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) yang berkembang di tahun 1960-an, *Zero Based Budgeting* (ZBB) yang berkembang di tahun 1970-an, *Line-item Budgeting* yang banyak diterapkan di negara berkembang, terkahir *Performance Based Budgeting* (PBB) yang berkembang mulai tahun 1990-an.

Sistem anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem dimana fokus utamanya adalah pemanfaatan anggaran yang disediakan, demi pencapaian yang optimal pada pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dimaksudkan dan ditujukan dengan mengedepankan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan dampak (*outcomes*) atau alokasi pengeluaran (*input*) yang ditentukan oleh organisasi. Dimana penyusunan anggaran tersebut berdasarkan target tertentu yang ingin dicapai dalam satu periode anggaran. Sehingga pada prinsipnya penganggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengukuran kinerja program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, karena publik menyoroti kinerja pemerintah saat ini. Untuk melihat bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dapat dilihat melalui pengukuran dan capaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu instansi atau lembaga pemerintah.

Berikut adalah pengukuran dan capaian kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Nita Megawati (UMP Skripsi 2013) Deskriptif Kualitatif Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja hasil temuan Penyusunan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Sekatan) Reza Nanda (JIMEKA Jurnal 2016) Deskriptif Kualitatif Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya Meriyatus Sofiani (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 2018) Deskriptif Kualitatif Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Sosial Kota Surabaya sudah dilakukan dengan baik. Itu semua terbukti dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Enam Instansi Pemerintah Kota / Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat) Windy Diyandra (UNPAD Skripsi 2018) Deskriptif Kualitatif Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berhubungan signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, dengan koefisien korelasi yang sangat kuat yaitu sebesar 0,848 atau 84,8%. Sedangkan sisanya sebesar 15.2% dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar model penelitian.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisis Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan induktif. Selain itu penulis menggunakan pengumpulan data informasi menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkumpul penulis analisis dengan mereduksi data kemudian menyajikan data dan yang terakhir menarik kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikemukakan oleh Halim dan Iqbal (2012: 174)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran daerah atau APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang selama satu tahun anggaran. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, dalam konteks penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, Bappeda Litbang Kota Tarakan telah melaksanakan dan menerapkan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Prinsip tersebut terdiri dari:

3.1.1 Transparansi dan Akuntabilitas anggaran

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, yang dimaksud transparansi anggaran yakni memuat semua penyajian informasi anggaran kepada masyarakat yang antara lainnya adalah mencantumkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan. Hal ini masih terus dicoba untuk diterapkan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagai bentuk transparansi anggaran.

a. Penyajian Informasi

Berdasarkan informasi yang disampaikan serta data yang diperoleh penulis bahwa website khusus Bappeda Kota Tarakan memang belum dapat diakses secara maksimal. Website tersebut hanya menampilkan profil Bappeda Litbang Kota Tarakan serta informasi kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan.

b. Bentuk Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada laporan keuangan, seperti dalam LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui PPKD setelah tahun anggaran berakhir.

3.1.2 Disiplin anggaran

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Bappeda Litbang Kota Tarakan sudah cukup disiplin dalam hal penggunaan anggaran hal ini dapat dilihat melalui pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2020 yang capaian kinerjanya mencapai 88,5%. Menurut data yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan masuk kategori berhasil meskipun ada beberapa sasaran strategis yang belum tercapai secara maksimal.

3.1.3 Keadilan anggaran

Penggunaan anggaran yang telah tersedia harus dilakukan secara adil terhadap program dan kegiatan yang telah tersusun sebelumnya. Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam penggunaan anggaran telah dilakukan secara merata serta adanya pengawasan yang berasal dari masyarakat juga agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan adil dan transparan.

a. Komposisi anggaran yang adil

Penggunaan anggaran yang adil bertujuan agar bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Setiap penggunaan anggaran harus sesuai dengan yang disampaikan RKA. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kasubbag Perencanaan Keuangan Bappeda Litbang Kota Tarakan pada 12 Januari 2022 bahwa: Setiap penggunaan anggaran di Bappeda harus sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Walikota Tarakan yaitu dasar dari penggunaan anggaran setiap Perangkat Daerah harus berdasarkan Rancangan Kerja Anggaran. Agar nantinya antara program dengan kegiatan di Bappeda sejalan dengan program dari Pemkot Tarakan.

3.1.4 Efektivitas dan efisiensi anggaran

Penerapan penganggaran dengan pendekatan kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem berbasis kinerja. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya tersebut. Ini juga berkaitan dengan pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk juga efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

a. Efektivitas dan efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Diukur dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses program dan kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika sebuah produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan penggunaan sumberdaya dan anggaran seminimal mungkin. Terlihat realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar 85,14%, anggaran yang tersisa sebesar 14,86%, pemanfaatan anggaran terbilang sangat efisien karena pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan dengan 4 sasaran jika dirata – ratakan mencapai 88.40%, jika dibandingkan dengan presentase realisasi anggaran (88.40 dikurangi 82.89) selisih efisiensinya sebesar 5.51%. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan, dapat dilihat melalui capaian kinerja Sasaran Renstra setelah revidi dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi terhadap Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kota Tarakan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (≥100%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	Persentase capaian program daerah di RKPD	125.29%	85.16 %	18.72%
		Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	98.85%		

		Konsistensi Program Renstra PD dengan RPJMD	99.11%		
		Konsistensi Program Renja PD dengan Renstra PD	100%		
		Konsistensi Program Renja PD dengan RKPD	100%		
		Persentase penyelesaian Dokumen perencanaan daerah yang disampaikan tepat waktu	100%		
		Rata-Rata Capaian	104%	85.16%	18.72%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi pembangunan yang dibutuhkan dapat tersedia dan tepat waktu	100%	66.86 %	33.14%
3	Meningkatkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencanaan	50%	88.66 %	-38,66%
4	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai / Predikat AKIP oleh APIP	99,45%	90,86%	8,86%
		Presentase Temuan yang Ditindaklanjuti	100%		
		Rata-Rata Capaian	99,73%		
		Rata-Rata	88,40%	82,89%	5.51%

Sumber: LAKIP Bappeda Litbang Kota Tarakan 2020

Dari tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 dengan tingkat efisiensi sebesar 18.72% dan tingkat efektifitas sebesar 104%;
- b. Sasaran 2 dengan tingkat efisiensi sebesar 33.14% dan tingkat efektifitas sebesar 100%;
- c. Sasaran 3 dengan tingkat efisiensi sebesar -38.66% dan tingkat efektifitas sebesar 50%.
- d. Sasaran 4 dengan tingkat efisiensi sebesar 8,86% dan tingkat efektifitas sebesar 99.73%;

3.1.5 Disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran yang setiap tahunnya telah disusun oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan dengan mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusannya melalui RKA – PD. Proses untuk mendapatkan data yang kuantitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sehingga hal ini yang menjelaskan manfaat dari setiap program pada rencana strategis yang dibuat oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan.

- a. Mengutamakan pencapaian hasil kerja (*output / outcome*)
Dilihat dari pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan tentunya memperlihatkan hasil yang baik terutama dalam hal realisasi anggaran serta kegiatan dan program dapat terealisasi secara fisik.
- b. Profesionalisme Kerja
Anggaran yang telah disusun tiap tahunnya untuk membentuk pemerintahan menjadi lebih baik sebagai perencanaan yang matang dari masing – masing instansi. Selain itu anggaran juga harus mampu menumbuhkan semangat profesionalisme kerja pada setiap aparatur di instansi tersebut.

3.2 Faktor Penghambat

Berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di Bappeda Kota Tarakan:

1. Penyajian informasi sebagai bentuk transparansi anggaran di Bappeda Litbang Kota Tarakan masih terkendala oleh belum adanya teknisi atau tenaga ahli yang khusus menangani website.
2. Penetapan program yang masih belum terukur.
3. Adanya perubahan rencana dan anggaran serta sistem pertemuan yang disebabkan oleh adanya pandemi.

3.3 Upaya yang Dilakukan

Dengan adanya beberapa hambatan di atas Bappeda Litbang Kota Tarakan harus melakukan upaya penanganan antara lain:

1. Mencari tenaga ahli khusus untuk mengurus terkait publikasi kegiatan agar tercapainya transparansi dalam pelaksanaan anggaran.
2. Mengkaji ulang kegiatan yang belum dapat terlaksana secara maksimal.
3. Berkoordinasi secara daring melalui media online.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, karena publik menyoroti kinerja pemerintah saat ini. Untuk melihat bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dapat dilihat melalui pengukuran dan capaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja mengukur atau menilai

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu instansi atau lembaga pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta dikaitkan dengan data – data yang terkumpul di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan meliputi:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, Bappeda Litbang Kota Tarakan perlu melakukan publikasi secara mandiri melalui website khusus Bappeda Litbang Kota Tarakan. Dalam bentuk pelaporannya Bappeda Litbang Kota Tarakan telah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- b. Disiplin anggaran, berdasarkan data yang didapat bahwa pengelolaan keuangan Bappeda Litbang Kota Tarakan sudah terbilang baik namun masih perlu adanya evaluasi dan koreksi terhadap sasaran program ada dapat terealisasi sesuai target.
- c. Keadilan anggaran, yang mana pemetaan atau perencanaan terhadap anggaran telah sesuai dengan RKA yang membuat realisasi program kegiatan menjadi tinggi.
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran, berdasarkan data dikumpulkan di lapangan tingkat efisiensi anggaran terhadap program kegiatan mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan tingkat efektivitasnya. Menunjukkan perencanaan Bappeda Litbang Kota Tarakan masuk dalam kategori sangat baik namun masih belum maksimal.
- e. Penyusunan dengan pendekatan kinerja, berdasarkan hasil wawancara dengan naarasumber dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran di Bappeda Litbang Kota Tarakan mengutamakan pencapaian kepada hasil kerja (output/outcome).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya mengambil data dari informan internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis penerapan prinsip anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan staff yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Keempat (Seri Bunga Rampai)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Robinson, M., & Brumby, J. (2005). *Does Performance Based Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature*. IMF.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Kepada Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

SUMBER BACAAN ILMIAH

Megawati, N. (2013). *Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi UMP.

Reza Nanda, D. (2016). *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 327-340.

Sofiani, M. (2019, November). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1-15.